

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Teori POAC

Teori POAC merupakan kerangka dasar dalam manajemen yang mencakup empat fungsi utama, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan). Menurut George R. Terry dalam Siagian (2014), POAC menggambarkan proses manajerial yang sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, POAC menjadi pedoman penting bagi kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi berbagai program, termasuk dalam hal pengelolaan kesiswaan. Perencanaan yang matang, struktur organisasi yang jelas, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berkesinambungan menjadi pilar penting dalam mengelola peserta didik secara profesional. Lebih lanjut, penerapan POAC dalam manajemen kesiswaan memungkinkan sekolah untuk mengatur dan membina siswa secara sistematis dengan memperhatikan aspek kebutuhan, karakteristik, dan potensi mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Handayani (2020), fungsi POAC harus dijalankan secara terpadu agar aktivitas sekolah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga edukatif dan humanis. Melalui pendekatan ini, pembinaan kedisiplinan siswa tidak semata-mata berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan karakter melalui proses yang dialogis dan reflektif. Dengan demikian, teori POAC menjadi relevan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji efektivitas manajemen kesiswaan berbasis pendekatan emansipatoris.

Perencanaan (*Planning*) dalam POAC menekankan pentingnya penyusunan strategi dan program yang terstruktur, mempertimbangkan kebutuhan, karakteristik, dan potensi siswa. Dalam manajemen kesiswaan, perencanaan meliputi penetapan tujuan kedisiplinan, tata tertib sekolah, program pembinaan karakter, serta mekanisme partisipasi siswa (Handayani, 2020). Perencanaan

yang matang menjadi fondasi agar seluruh aktivitas sekolah berjalan sistematis dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Pengorganisasian (*Organizing*) menekankan penyusunan struktur, peran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan program. Dalam manajemen kesiswaan, pengorganisasian mencakup pembagian tugas antara guru, wali kelas, guru BK, pengurus OSIS, dan kepala sekolah. Struktur yang jelas memudahkan koordinasi, komunikasi, serta pelaksanaan program yang konsisten dan tepat sasaran. Selain itu, pengorganisasian yang baik memungkinkan keterlibatan siswa dalam mengambil peran aktif, seperti dalam pengambilan keputusan terkait tata tertib dan kegiatan kesiswaan, sehingga sejalan dengan prinsip emansipatoris (Freire, 2005; Habermas, 1984).

Pelaksanaan (*Actuating*) menekankan implementasi program sesuai rencana dan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Dalam konteks kesiswaan, pelaksanaan mencakup pembinaan kedisiplinan melalui kegiatan dialogis, konseling, pembiasaan perilaku positif, serta monitoring aktivitas siswa. Penerapan POAC yang berfokus pada pelaksanaan yang tepat sasaran menjamin bahwa setiap kegiatan tidak hanya formalitas, tetapi memberi dampak nyata terhadap perkembangan karakter dan kedisiplinan siswa (Handayani, 2020).

Pengawasan (*Controlling*) berfungsi untuk memonitor, mengevaluasi, dan menilai efektivitas program serta pencapaian tujuan. Dalam manajemen kesiswaan, pengawasan tidak hanya berupa penegakan aturan, tetapi juga evaluasi melalui dialog, refleksi, dan feedback dari siswa. Hal ini memungkinkan sekolah menyesuaikan program sesuai dinamika kebutuhan siswa dan konteks sekolah, sehingga proses pembinaan kedisiplinan menjadi lebih humanis dan partisipatif (Mulyasa, 2017; Tilaar, 2012).

Lebih lanjut, penerapan POAC dalam manajemen kesiswaan memungkinkan integrasi antara struktur administratif sekolah dan pendekatan emansipatoris/emansipatoris. Dengan kata lain, manajemen kesiswaan tidak hanya mengatur kegiatan formal siswa, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, sosial, dan karakter mereka. Misalnya, perencanaan yang mempertimbangkan aspirasi siswa, pengorganisasian yang melibatkan siswa sebagai pengambil peran, pelaksanaan yang menekankan dialog dan refleksi, serta pengawasan yang

memberikan feedback konstruktif, semuanya membentuk ekosistem pembelajaran yang mendukung disiplin berbasis kesadaran, bukan kepatuhan semata (Freire, 2005).

Teori POAC juga relevan untuk mengkaji efektivitas manajemen kesiswaan berbasis pendekatan emansipatoris karena setiap fungsi saling terkait dan harus dijalankan secara terpadu. Ketidakseimbangan antar fungsi, misalnya pelaksanaan tanpa perencanaan matang atau pengawasan tanpa refleksi, dapat menyebabkan program disiplin tidak berjalan optimal. Sebaliknya, integrasi POAC dengan pendekatan dialogis dan partisipatif dapat mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang mendukung internalisasi nilai disiplin, pengembangan karakter, serta partisipasi aktif siswa (Handayani, 2020; Mulyasa, 2017).

Secara praktis, penerapan POAC dalam kesiswaan dapat menjadi model operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam mengelola kedisiplinan siswa. Melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang dialogis, pengawasan reflektif, dan pengorganisasian yang terstruktur, sekolah mampu membentuk budaya kedisiplinan yang berkelanjutan dan adaptif. Model ini juga memberikan ruang bagi inovasi dalam kegiatan kesiswaan, seperti program mentoring, pembiasaan positif, dan forum siswa-guru, sehingga kedisiplinan tidak hanya dipaksakan melalui aturan, tetapi muncul dari kesadaran dan tanggung jawab bersama (Freire, 2005; Ratnawulan & Juliana, 2025).

Dengan demikian, teori POAC menjadi kerangka analisis yang sangat relevan dalam penelitian ini, karena memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi keefektifan manajemen kesiswaan berbasis emansipatoris/emansipatoris di SMP. Teori ini menjadi fondasi untuk menilai bagaimana sekolah merencanakan, menjalankan, mengorganisasi, dan mengawasi program kesiswaan yang bertujuan meningkatkan kedisiplinan siswa melalui partisipasi, dialog, dan refleksi kritis.

Penerapan Teori POAC dalam Manajemen Kesiswaan dan Kedisiplinan Siswa, dalam konteks manajemen kesiswaan, teori POAC sangat relevan digunakan untuk mengatur dan mengarahkan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan siswa, termasuk dalam upaya membentuk dan meningkatkan kedisiplinan. Berikut ini penjabaran peran setiap fungsi POAC dalam manajemen kesiswaan :

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan fondasi dari seluruh proses manajemen kesiswaan. Dalam konteks kedisiplinan, perencanaan berfungsi untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, merumuskan kebijakan, dan menyusun strategi yang mendukung pembentukan perilaku disiplin siswa.

Lebih dari sekadar menyusun jadwal dan aturan, perencanaan dalam perspektif emansipatoris menekankan partisipasi dan analisis kebutuhan siswa, sehingga program yang dibuat tidak bersifat impositif. Perencanaan harus mempertimbangkan karakteristik psikologis siswa, lingkungan sosial, serta budaya sekolah agar aturan dan program kedisiplinan dapat diterima dan diinternalisasi secara efektif (Mulyasa, 2017).

Dalam perencanaan, manajer kesiswaan tidak hanya berpikir tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana cara melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi potensi resistensi terhadap aturan yang dirumuskan. Dengan demikian, perencanaan berfungsi sebagai alat strategis untuk membangun kepatuhan yang sadar, bukan kepatuhan mekanis.

Perencanaan dalam manajemen kesiswaan mencakup penetapan tujuan pendidikan dan program pembinaan siswa yang mencakup aspek akademik maupun non - akademik, termasuk penguatan karakter dan kedisiplinan. Menurut Mulyasa (2013), “perencanaan dalam pendidikan harus mencakup analisis kebutuhan peserta didik dan strategi jangka panjang yang mendukung proses pembentukan karakter. “Contoh penerapan : Merancang program kegiatan rutin seperti apel pagi, peraturan sekolah, dan kegiatan pembiasaan yang menanamkan nilai disiplin.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam POAC bertujuan untuk menyusun struktur, pembagian tugas, dan sumber daya agar tujuan manajemen kesiswaan tercapai secara efektif. Fungsi ini menekankan keteraturan dan koordinasi dalam pelaksanaan program pembinaan siswa, termasuk pembinaan kedisiplinan (Sagala, 2013).

Dalam kerangka emansipatoris, pengorganisasian bukan sekadar menempatkan posisi guru atau staf, tetapi juga memberikan ruang partisipatif bagi siswa. Struktur organisasi kesiswaan harus mampu mengakomodasi peran aktif

siswa dalam proses pengawasan dan evaluasi perilaku. Dengan begitu, siswa belajar mengelola diri sendiri dan komunitasnya, sekaligus memahami hubungan antara peran, tanggung jawab, dan konsekuensi dari tindakan mereka.

Lebih jauh, pengorganisasian dalam manajemen kesiswaan juga berfungsi untuk membentuk sistem komunikasi yang jelas antara pihak sekolah dan siswa. Sistem komunikasi yang terbuka memungkinkan penyampaian nilai-nilai disiplin secara efektif dan mendorong keterlibatan siswa dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka di sekolah.

Pengorganisasian dilakukan dengan membentuk struktur kerja tim kesiswaan, pembagian tugas antara wali kelas, guru BK, dan guru piket, serta pelibatan OSIS dalam membantu pengawasan disiplin siswa. Menurut Sagala (2013), “pengorganisasian adalah proses penataan sumber daya sekolah agar tujuan pengelolaan peserta didik tercapai secara efektif. “Contoh penerapan : Menyusun struktur kepengurusan OSIS atau tim ketertiban sekolah yang bertugas memantau kedisiplinan harian.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan atau *actuating* adalah inti dari fungsi manajemen yang mentransformasikan rencana menjadi tindakan nyata. Dalam konteks kesiswaan dan kedisiplinan, fungsi ini mencakup pembinaan, motivasi, dan arahan bagi siswa agar mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi.

Pendekatan emansipatoris dan emansipatoris menekankan bahwa pelaksanaan manajemen kesiswaan harus berbasis hubungan yang positif antara guru dan siswa. Hubungan ini memungkinkan guru untuk menjadi fasilitator, mentor, dan model perilaku disiplin, sekaligus mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pengembangan diri mereka sendiri (Uno, 2011).

Fungsi *actuating* juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu kemampuan siswa untuk mematuhi aturan karena memahami nilai dan manfaatnya, bukan karena takut sanksi. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan emansipatoris yang menekankan kesadaran kritis siswa (*conscientization*) terhadap aturan dan norma yang berlaku.

Fungsi ini dijalankan dengan membina, memotivasi, dan mengarahkan siswa untuk memahami nilai - nilai disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab pribadi. Pendekatan emansipatoris bisa digunakan dalam fungsi ini untuk menjalin hubungan emosional positif antara guru dan siswa. Uno (2011) menyatakan bahwa “dalam pendidikan, pelaksanaan harus berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik melalui motivasi, komunikasi, dan keteladanan. “Contoh penerapan : Guru memberikan pembinaan dengan pendekatan persuasif, memberi penghargaan kepada siswa disiplin, serta menjadi teladan dalam kedisiplinan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan atau controlling adalah fungsi manajemen yang memastikan semua rencana dan program berjalan sesuai tujuan. Dalam manajemen kesiswaan, controlling berfokus pada pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap perilaku siswa dan efektivitas aturan yang diterapkan (Suryosubroto, 2009).

Dalam kerangka emansipatoris, pengawasan tidak bersifat represif, melainkan reflektif dan partisipatif. Siswa dilibatkan dalam proses evaluasi perilaku dan efektivitas aturan, sehingga mereka memahami hubungan antara tindakan, konsekuensi, dan tanggung jawab sosial. Fungsi pengawasan juga berperan dalam mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi aturan, sehingga kebijakan kedisiplinan dapat disesuaikan secara dinamis sesuai kebutuhan siswa.

Lebih jauh, controlling dalam manajemen kesiswaan yang berbasis POAC mengintegrasikan proses feedback dua arah, di mana siswa dapat menyampaikan persepsi dan masukan tentang pelaksanaan aturan, sementara guru dapat memberikan arahan dan pembinaan secara konstruktif.

Pengawasan dilakukan untuk menilai sejauh mana program dan aturan kedisiplinan diterapkan oleh siswa, sekaligus memberikan umpan balik atau tindak lanjut. Menurut Suryosubroto (2009), “pengawasan harus dilakukan secara terus - menerus dan mencakup evaluasi perilaku siswa secara menyeluruh”. Contoh penerapan : Mengadakan evaluasi harian / mingguan tentang kedisiplinan, laporan pelanggaran siswa, atau sidang pembinaan siswa.

Sinergi POAC dan Penerapan Emansipatoris, Keempat fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) saling berkaitan dan membentuk

siklus manajemen yang utuh. Dalam penerapan manajemen kesiswaan, integrasi keempat fungsi ini menghasilkan sistem yang:

- a. Terstruktur dan sistematis, berlandaskan perencanaan matang dan pembagian peran yang jelas.
- b. Humanis dan partisipatif, memberi ruang bagi siswa untuk berkontribusi dalam pembuatan aturan, evaluasi, dan pengembangan program.
- c. Reflektif dan adaptif, melalui pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus, kebijakan kesiswaan dapat diperbaiki sesuai konteks dan kebutuhan siswa.
- d. Sinergi ini memungkinkan manajemen kesiswaan berfungsi tidak hanya sebagai pengendalian administratif, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran disiplin siswa. Disiplin siswa menjadi hasil dari pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kepatuhan karena takut sanksi.

Relevansi Teori POAC dengan Kedisiplinan Berbasis Kesadaran, Penerapan POAC secara komprehensif memungkinkan sekolah membangun kedisiplinan berbasis kesadaran, di mana siswa memahami tujuan aturan, proses penegakan, dan dampaknya terhadap diri sendiri maupun komunitas. Perencanaan yang matang menyiapkan konteks disiplin, pengorganisasian menstrukturkan peran dan tanggung jawab, *actuating* menginternalisasi nilai, dan *controlling* memastikan keselarasan antara tujuan dan realisasi perilaku siswa.

Dengan demikian, teori POAC bukan sekadar kerangka manajemen formal, tetapi juga alat untuk mengembangkan budaya disiplin yang berkelanjutan melalui pendekatan yang partisipatif, reflektif, dan humanis. Pendekatan ini selaras dengan prinsip pendekatan emansipatoris yang menekankan pemberdayaan siswa sebagai subjek aktif dalam pendidikan (Freire, 2005; Habermas, 1984; Mulyasa, 2017).

2. Manajemen Kesiswaan

Manajemen kesiswaan merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan yang bertujuan mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan peserta didik sejak masuk hingga lulus dari suatu lembaga pendidikan. Asututi (2023) menjelaskan bahwa “fungsi utama dari manajemen kesiswaan meliputi

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan siswa, seperti penerimaan siswa baru, pembinaan disiplin, pengembangan bakat dan minat, serta layanan bimbingan dan konseling”. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen kesiswaan memiliki peran krusial karena mencakup pengelolaan seluruh aspek siswa secara sistematis.

Menurut Arinalhaq dkk. (2025), “manajemen kesiswaan berperan signifikan dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa dengan faktor-faktor seperti lingkungan sekolah, dukungan guru, dan kegiatan tambahan di sekolah yang memainkan peran penting dalam proses ini”. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi pedagogis dan psikologis dalam membina kepribadian siswa.

Badruddin (2014) menegaskan bahwa “manajemen peserta didik merupakan proses pembinaan dan pengembangan siswa melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Aspek yang dikelola mencakup identifikasi kebutuhan siswa, pendampingan perkembangan pribadi, dan penanganan masalah perilaku”. Kesimpulannya, manajemen kesiswaan merupakan usaha terpadu untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik akademik maupun non-akademik.

Astuti dan Purwani (2023) menambahkan bahwa “manajemen kesiswaan yang efektif mampu menciptakan kultur sekolah yang positif. Hal ini tercermin melalui pembiasaan perilaku disiplin, kerja sama antar siswa, serta pembentukan kebiasaan belajar yang baik”. Dengan demikian, keberhasilan manajemen kesiswaan sangat bergantung pada kualitas komunikasi dan keterlibatan seluruh pihak sekolah, termasuk siswa sebagai partisipan aktif dalam kegiatan sekolah.

Permana, Giatman, & Yustisia (2025) menekankan bahwa “integrasi teknologi dan pendekatan personal dalam manajemen kesiswaan mampu meningkatkan efisiensi administrasi serta efektivitas pembinaan karakter siswa”. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan zaman menjadi faktor penting dalam keberhasilan manajemen kesiswaan di era pendidikan modern.

Suharsimi Arikunto (2009) juga menegaskan bahwa “manajemen peserta didik bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimal sesuai potensi yang dimiliki. Proses manajemen harus dilandasi asas keadilan, demokrasi, dan tanggung jawab, terutama dalam menghadapi masalah-masalah kedisiplinan”. Hal ini memperkuat gagasan bahwa manajemen kesiswaan harus mengedepankan asas partisipatif dan keadilan, bukan sekadar kontrol.

Lebih lanjut, manajemen kesiswaan berbasis pendekatan emansipatoris menekankan posisi siswa sebagai subjek aktif dalam proses pengelolaan sekolah. Bukan hanya mematuhi aturan, tetapi turut merumuskan, mengevaluasi, dan memahami makna aturan tersebut melalui dialog kritis dengan guru dan pihak sekolah (Freire, 2005).

Dalam kerangka emansipatoris, kedisiplinan siswa dipandang sebagai hasil dari kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar ketaatan terhadap norma yang dipaksakan. Dengan demikian, siswa belajar menginternalisasi nilai disiplin melalui partisipasi aktif, refleksi, dan dialog (Habermas, 1984).

Pendekatan ini juga memungkinkan siswa mengenali konsekuensi dari tindakan mereka dan terlibat dalam pemecahan masalah terkait perilaku, sehingga proses kedisiplinan menjadi lebih transformatif dan bermakna (Freire, 2005; Tilaar, 2012).

Manajemen kesiswaan yang berbasis emansipatoris menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab antara guru, siswa, dan pihak sekolah, di mana keputusan terkait tata tertib dan kegiatan kesiswaan disusun secara kolaboratif. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi demokratis dalam pendidikan (Mulyasa, 2017).

Penerapan pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk bersikap fasilitatif, bukan hanya sebagai pengawas atau pemberi hukuman. Guru bertindak sebagai mediator yang membantu siswa memahami aturan dan mengevaluasi pengalaman mereka sehingga kedisiplinan muncul dari kesadaran internal, bukan sekadar kepatuhan mekanis (Freire, 2005).

Selain itu, manajemen kesiswaan emansipatoris mampu mendorong pembelajaran kontekstual terkait kedisiplinan. Siswa diajak menganalisis kasus nyata di sekolah, berdiskusi tentang solusi, dan mengevaluasi hasil tindakannya,

sehingga kedisiplinan dan tanggung jawab sosial mereka berkembang secara berkelanjutan (Creswell, 2014).

Kesimpulannya, manajemen kesiswaan berbasis pendekatan emansipatoris merupakan strategi penting dalam pendidikan modern karena memberdayakan siswa sebagai subjek aktif, kritis, dan partisipatif, sekaligus membangun kedisiplinan yang sadar, reflektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen kesiswaan tidak lagi bersifat represif atau normatif, melainkan menjadi praktik pendidikan yang transformasional dan membebaskan (Freire, 2005; Habermas, 1984).

Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Kesiswaan, manajemen kesiswaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang berfokus pada pengelolaan peserta didik agar tercapai perkembangan yang optimal. Tujuan utama manajemen kesiswaan, menurut Mulyasa (2013), adalah memastikan keberadaan peserta didik dapat diatur secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, sekolah diharapkan mampu menata seluruh aktivitas siswa, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, sehingga sumber daya yang ada digunakan secara maksimal dan waktu belajar siswa dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Selain itu, manajemen kesiswaan bertujuan untuk membantu siswa mencapai perkembangan optimal dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini sejalan dengan pandangan pendidikan yang holistik, bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencetak prestasi akademik, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, sikap sosial, dan keterampilan hidup. Dengan pendekatan manajemen yang tepat, setiap siswa dapat didukung untuk berkembang sesuai potensi, minat, dan bakatnya.

Tujuan berikutnya adalah menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Layanan ini mencakup penyediaan fasilitas belajar, bimbingan konseling, dukungan psikososial, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan keterampilan, minat, dan bakat siswa. Pemberian layanan yang holistik ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang seimbang antara kebutuhan belajar dan kebutuhan pengembangan diri (Mulyasa, 2013).

Sejalan dengan tujuan tersebut, ruang lingkup manajemen kesiswaan meliputi berbagai kegiatan yang mendukung keteraturan, pembinaan, dan pemberdayaan siswa. Sutisna (2011) menjelaskan bahwa ruang lingkup ini dimulai dari penerimaan siswa baru (PPDB), yaitu proses seleksi dan registrasi peserta didik yang harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan kapasitas sekolah. Proses ini penting karena menjadi langkah awal dalam memastikan kualitas dan kesesuaian peserta didik dengan visi misi sekolah.

Selanjutnya, ruang lingkup mencakup pengelolaan data siswa, yang tidak hanya terbatas pada catatan administratif, tetapi juga mencakup rekam jejak akademik, prestasi, perkembangan karakter, serta catatan bimbingan dan konseling. Pengelolaan data yang sistematis memungkinkan sekolah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan setiap siswa secara individual, sehingga program pembinaan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Pembinaan disiplin dan tata tertib menjadi aspek krusial berikutnya dalam manajemen kesiswaan. Disiplin siswa bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi mencakup pembentukan kesadaran, tanggung jawab, dan integritas pribadi. Manajemen kesiswaan yang efektif menempatkan disiplin sebagai proses pembelajaran yang memberdayakan siswa, bukan hanya sebagai mekanisme pengendalian. Pendekatan yang partisipatif, misalnya melibatkan siswa dalam penyusunan tata tertib dan evaluasi perilaku, sesuai dengan prinsip manajemen kesiswaan modern yang humanis dan emansipatoris (Freire, 2005; Mulyasa, 2013).

Selain itu, manajemen kesiswaan juga mencakup layanan bimbingan konseling, yang berfungsi untuk mendukung perkembangan psikologis, sosial, dan akademik siswa. Konselor atau guru BK berperan dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi, sosial, maupun akademik, serta memberikan arahan agar siswa dapat membuat keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Layanan ini harus dirancang secara proaktif, bukan sekadar menunggu masalah muncul, sehingga fungsi preventif dan promotif dapat berjalan optimal.

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler menjadi bagian penting lainnya dari ruang lingkup manajemen kesiswaan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan bakat dan minat siswa, tetapi juga sebagai media

pembentukan karakter, keterampilan sosial, dan kerja sama tim. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler yang terkelola baik, siswa belajar bertanggung jawab, disiplin, dan berperan aktif dalam komunitas sekolah.

Selain itu, manajemen kesiswaan juga mencakup kegiatan alumni dan tindak lanjut lulusan, yang berfungsi untuk membangun jejaring sosial dan profesional, serta mengukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan siswa menghadapi kehidupan pasca-sekolah. Aktivitas ini memungkinkan sekolah melakukan evaluasi jangka panjang terhadap efektivitas program pembinaan siswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan manajemen kesiswaan di masa mendatang (Sutisna, 2011).

Secara keseluruhan, manajemen kesiswaan berperan sebagai pengatur, fasilitator, dan pembimbing dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Melalui tujuan yang jelas dan ruang lingkup yang komprehensif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang tertib, kondusif, dan memberdayakan siswa untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan berdaya saing.

Dalam kerangka penelitian yang berbasis pendekatan emansipatoris, seluruh komponen tujuan dan ruang lingkup manajemen kesiswaan harus dirancang agar siswa bukan hanya sebagai objek pengelolaan, tetapi juga sebagai subjek aktif. Misalnya, dalam pembinaan disiplin, siswa dapat dilibatkan dalam penyusunan tata tertib dan evaluasi perilaku, sementara dalam pengembangan ekstrakurikuler, siswa diberi kesempatan untuk memimpin, berinovasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Freire, 2005; Mulyasa, 2013).

Dengan demikian, manajemen kesiswaan yang komprehensif mengintegrasikan administrasi, pembinaan, layanan, dan pemberdayaan siswa, sehingga setiap aktivitas tidak hanya bertujuan untuk keteraturan, tetapi juga untuk menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan kompetensi siswa secara menyeluruh. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang menekankan humanisme, partisipasi, dan kesadaran kritis.

Fungsi Manajemen Kesiswaan (POAC) Menurut Terry (2006), fungsi manajemen secara umum yang relevan diterapkan pada manajemen kesiswaan adalah :

Tabel 2 1 Fungsi Manajemen POAC dalam Manajemen Kesiswaan

Fungsi POAC	Aplikasinya dalam Manajemen Kesiswaan
<i>Planning</i>	Menyusun program pembinaan disiplin dan pengembangan minat siswa
<i>Organizing</i>	Menentukan struktur organisasi siswa dan membagi tugas antar pendidik
<i>Actuating</i>	Melaksanakan program pembinaan dan layanan siswa
<i>Controlling</i>	Mengevaluasi kedisiplinan, absensi, dan partisipasi siswa

Manajemen kesiswaan merupakan salah satu pilar penting dalam manajemen pendidikan yang berfungsi mengatur, membimbing, dan memberdayakan peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan berakarakter (Mulyasa, 2013). Menurut Mulyasa (2013), prinsip-prinsip manajemen kesiswaan mencakup beberapa aspek penting yang saling terkait dan harus dijalankan secara terpadu. Pertama, keterpaduan, yakni program kesiswaan harus selaras dan terintegrasi dengan tujuan serta visi sekolah secara keseluruhan. Hal ini memastikan bahwa setiap kegiatan kesiswaan mendukung pengembangan kompetensi akademik dan non-akademik siswa secara seimbang. Kedua, keadilan, di mana seluruh siswa diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Ketiga, efektivitas, yakni kegiatan kesiswaan dirancang tepat guna, efisien, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Keempat, berorientasi pada pengembangan siswa, sehingga setiap program menitikberatkan pada penguatan potensi, kemampuan, dan kesadaran kritis siswa sebagai subjek pendidikan (Mulyasa, 2013).

Meskipun prinsip-prinsip ini telah diuraikan dengan jelas, penerapan manajemen kesiswaan di banyak sekolah menghadapi berbagai tantangan signifikan. Menurut Astuti dan Purwani (2023), beberapa kendala utama antara lain rendahnya koordinasi antar pihak sekolah, yang menyebabkan kebijakan dan program kesiswaan tidak tersinergi secara optimal. Selanjutnya, dominannya pendekatan hukuman dibanding reflektif, sehingga kedisiplinan siswa lebih bersifat kepatuhan mekanis daripada kesadaran internal. Ketiga, kurangnya pelibatan orang tua dalam pembinaan siswa, yang mengurangi kesinambungan

pendidikan antara sekolah dan rumah. Terakhir, minimnya pelatihan guru terkait pendekatan pembinaan yang emansipatoris dan partisipatif, sehingga guru sulit mengimplementasikan strategi yang mendorong kesadaran kritis dan pemberdayaan siswa (Astuti & Purwani, 2023).

Dalam konteks ini, pendekatan emansipatoris menawarkan perspektif yang lebih transformatif. Berbeda dengan pendekatan emansipatoris yang menekankan empati dan kasih sayang sebagai pusat interaksi, pendekatan emansipatoris menekankan pemberdayaan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan manajemen kedisiplinan (Freire, 2005). Dengan pendekatan ini, kedisiplinan tidak lagi dipahami sebagai alat pengendalian atau kepatuhan pasif, tetapi sebagai hasil internalisasi nilai melalui dialog kritis, refleksi bersama, dan partisipasi aktif siswa dalam merumuskan aturan dan konsekuensi. Implementasi prinsip keterpaduan, keadilan, dan pengembangan siswa tetap dijalankan, namun dibingkai dalam konteks pemberdayaan dan kesadaran kritis, sehingga siswa mampu memahami alasan dan tujuan setiap kebijakan sekolah.

Strategi manajemen kesiswaan yang relevan dengan pendekatan emansipatoris telah dikembangkan oleh beberapa penelitian. Menurut Arinalhaq et al. (2025), strategi yang efektif mencakup beberapa aspek: pertama, penerapan pendekatan emansipatoris dalam pembinaan karakter dan disiplin, yang dalam konteks emansipatoris ditingkatkan menjadi pendekatan dialogis dan partisipatif, di mana siswa ikut menentukan aturan, refleksi pelanggaran, dan evaluasi tata tertib. Kedua, digitalisasi layanan administrasi siswa dapat mempermudah akses informasi dan transparansi program kesiswaan, sehingga siswa memiliki ruang untuk memantau hak dan kewajiban mereka secara terbuka. Ketiga, pelatihan guru dalam bidang bimbingan dan pembinaan siswa, khususnya dalam mengelola proses dialog, refleksi, dan kesadaran kritis siswa. Keempat, pelibatan siswa dalam penyusunan tata tertib, sehingga aturan sekolah menjadi hasil kesepakatan bersama dan memiliki legitimasi moral di mata siswa, yang mendukung terciptanya kedisiplinan berbasis kesadaran, bukan paksaan (Arinalhaq et al., 2025; Freire, 2005).

Kajian kritis dari literatur menunjukkan bahwa implementasi manajemen kesiswaan berbasis pendekatan emansipatoris memiliki beberapa keunggulan

dibandingkan model tradisional atau emansipatoris semata. Pertama, siswa menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pembinaan disiplin, sehingga rasa memiliki terhadap sekolah meningkat dan perilaku disiplin menjadi internalisasi nilai, bukan sekadar kepatuhan eksternal (Freire, 2005; Habermas, 1984). Kedua, keterlibatan aktif siswa dalam perumusan aturan mengurangi dominasi otoriter dan meningkatkan transparansi serta keadilan. Ketiga, pendekatan ini mendorong budaya reflektif di antara guru dan siswa, di mana setiap pelanggaran atau masalah disiplin dianalisis bersama, bukan hanya diberi hukuman.

Namun, penerapan strategi emansipatoris dalam manajemen kesiswaan juga menuntut kesiapan struktural dan kultural dari pihak sekolah. Guru perlu dilatih untuk menjadi fasilitator dalam proses dialog dan refleksi siswa. Kepala sekolah dan staf harus memastikan koordinasi yang baik agar kebijakan sekolah selaras dengan prinsip keterpaduan dan efektivitas. Orang tua juga perlu dilibatkan sebagai mitra dalam membina kedisiplinan siswa agar ada kesinambungan antara sekolah dan rumah (Astuti & Purwani, 2023; Arinalhaq et al., 2025).

Secara keseluruhan, prinsip, tantangan, dan strategi manajemen kesiswaan dapat dikontekstualisasikan melalui pendekatan emansipatoris. Prinsip-prinsip seperti keterpaduan, keadilan, efektivitas, dan pengembangan siswa tetap menjadi landasan, tetapi diimplementasikan melalui proses partisipatif dan reflektif. Tantangan yang muncul dapat diatasi dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua secara aktif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesiswaan. Strategi yang dikembangkan menekankan dialog kritis, pemberdayaan, dan transparansi, sehingga kedisiplinan siswa menjadi hasil dari kesadaran kritis mereka sendiri, bukan hanya kepatuhan terhadap peraturan (Freire, 2005; Habermas, 1984; Arinalhaq et al., 2025).

Dengan demikian, manajemen kesiswaan berbasis pendekatan emansipatoris menawarkan model pembinaan yang tidak hanya menekankan kepatuhan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis, tanggung jawab, dan partisipasi aktif siswa. Pendekatan ini relevan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa SMP secara berkelanjutan dan membentuk budaya sekolah yang demokratis, inklusif, dan humanis sekaligus transformatif (Freire, 2005; Tilaar, 2012; Mulyasa, 2013).

3. Pendekatan Emansipatoris

Pendekatan emansipatoris dalam pendidikan merupakan paradigma yang memandang pendidikan sebagai praktik pembebasan individu dari struktur dominasi sosial dan ideologis. Pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga memberdayakan peserta didik untuk memahami dan menafsirkan pengalaman hidupnya dalam konteks sosial, politik, dan budaya, sehingga mereka mampu mengambil peran aktif dalam perubahan masyarakat yang lebih adil (Nouri & Sajjadi, 2014).

Secara historis, Paulo Freire menjadi tokoh sentral dalam pengembangan pendekatan ini. Ia menekankan bahwa pendidikan tradisional yang bersifat banking model, di mana siswa dianggap sebagai wadah pasif yang diisi oleh guru, justru memperkuat struktur kekuasaan yang menindas. Sebagai alternatif, Freire mengembangkan problem-posing education, yang menekankan dialog kritis antara guru dan siswa sebagai inti dari proses pembelajaran (Freire, 1970; Wikipedia, Problem-posing education).

Pendidikan emansipatoris menekankan bahwa siswa bukan sekadar penerima pengetahuan, tetapi subjek yang aktif, memiliki suara dan pengalaman yang sah. Dalam interaksi ini, siswa diajak menganalisis realitas sosial, memahami ketidakadilan, serta mencari solusi bersama melalui refleksi kritis. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh bersifat relevan dan transformatif, bukan hanya hafalan fakta (Nouri & Sajjadi, 2014).

Konsep ini diperkuat oleh teori tindakan komunikatif Habermas, yang menekankan pentingnya dialog rasional dan bebas dominasi untuk membangun pemahaman bersama. Dalam pendidikan, prinsip ini menggeser peran guru dari figur otoritatif menjadi fasilitator yang membantu peserta didik menyusun makna pengetahuan secara kolaboratif (Nugraheni & Firmansyah, 2020).

Pendekatan emansipatoris juga menasar transformasi sosial melalui pendidikan. Pendidikan tidak lagi hanya bersifat instruksional, tetapi sebagai sarana untuk memecahkan masalah sosial nyata, mengikis ketidakadilan, dan membentuk warga yang kritis dan bertanggung jawab. Hal ini menjadikan

pendidikan sebagai alat pembebasan, bukan alat reproduksi ketidakadilan sosial (Wikipedia, Emancipatory pedagogy).

Dalam praktiknya, pendidikan emansipatoris mendorong guru dan siswa untuk mengembangkan pengalaman belajar yang dialogis, kolaboratif, dan reflektif. Pembelajaran menjadi proses yang saling mempengaruhi, di mana siswa dilibatkan dalam perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan mereka tidak hanya formal, tetapi substantif (Nouri & Sajjadi, 2014).

Selain itu, pendekatan ini menekankan pentingnya analisis kritis terhadap struktur sosial yang memengaruhi kehidupan peserta didik. Siswa dibimbing untuk mempertanyakan norma, aturan, dan praktik pendidikan yang cenderung mengekang, sehingga mereka mampu memahami hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan (Nugraheni & Firmansyah, 2020).

Pendekatan emansipatoris juga mengintegrasikan kesadaran kritis dengan tindakan nyata (*praxis*), yaitu kemampuan siswa untuk menerapkan pemahaman kritis mereka dalam perubahan sosial. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi pengalaman akademik, tetapi juga alat pembentukan kapasitas sosial, politik, dan moral yang memadai (Freire, 1970; Wikipedia, Emancipatory pedagogy).

Selain aspek sosial, pendekatan ini menekankan humanisasi pendidikan. Semua peserta didik diakui martabatnya, dihargai perspektifnya, dan diberi kesempatan untuk berpikir kritis. Hal ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan demokratis, sekaligus membangun rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial pada diri siswa (Nouri & Sajjadi, 2014).

Akhirnya, pendekatan emansipatoris menawarkan paradigma transformatif yang menyatukan teori dan praktik pendidikan. Pendidikan bukan sekadar mekanisme transfer ilmu, tetapi menjadi ruang untuk refleksi, dialog, partisipasi, dan pembebasan. Konsep ini relevan dalam konteks pendidikan modern yang menuntut pembelajaran bermakna, inklusif, dan responsif terhadap tantangan sosial (Nugraheni & Firmansyah, 2020).

Pendekatan emansipatoris berlandaskan prinsip humanisasi, di mana setiap peserta didik dihargai sebagai individu yang memiliki potensi unik, pengalaman, dan kapasitas untuk berpikir kritis. Pendidikan yang humanis mendorong siswa

untuk mengambil peran aktif dalam membentuk proses belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan mereka (Nouri & Sajjadi, 2014).

Dialog menjadi prinsip kedua yang esensial. Proses belajar dipandang sebagai interaksi reflektif antara guru dan siswa, bukan sekadar instruksi satu arah. Dialog memungkinkan pertukaran ide secara setara, membongkar asumsi sosial, dan membangun pemahaman bersama tanpa dominasi (Wikipedia, Emancipatory pedagogy).

Selanjutnya, pendidikan emansipatoris menekankan analisis kritis terhadap struktur sosial. Siswa dilatih untuk memahami kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya menciptakan kesadaran kritis, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan untuk mengevaluasi dan bertindak terhadap ketidakadilan yang ada (Nugraheni & Firmansyah, 2020).

Prinsip transformasi sosial menjadi inti lain dari pendekatan ini. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan individu yang mampu menerapkan refleksi kritisnya dalam tindakan nyata untuk perubahan sosial. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami realitas, tetapi juga diberdayakan untuk memperbaikinya melalui kolaborasi dan aksi yang bermakna (Nouri & Sajjadi, 2014).

Pendekatan emansipatoris bertujuan membentuk kesadaran kritis siswa agar mereka mampu melihat dan menganalisis struktur sosial yang menindas dan memengaruhi kehidupan mereka. Kesadaran kritis ini menjadi fondasi bagi kemampuan refleksi dan pengambilan keputusan secara bermakna (Wikipedia, Emancipatory pedagogy).

Selain itu, pendekatan ini menekankan pemberdayaan siswa dan guru secara kolektif sehingga pembelajaran menjadi proses kolaboratif yang relevan dengan pengalaman nyata, bukan sekadar target akademik. Pemberdayaan ini membangun rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang kuat (Nouri & Sajjadi, 2014).

Pendidikan emansipatoris juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis dan inklusif, di mana setiap suara dihargai, dialog diprioritaskan, dan keputusan pendidikan dibentuk dari kesepakatan bersama. Hal

ini memungkinkan pembelajaran menjadi praktik nyata demokrasi (Wikipedia, Emancipatory pedagogy).

Tujuan akhirnya adalah membentuk individu yang mampu bertindak untuk perubahan sosial yang adil dan humanis. Pendidikan menjadi sarana strategis untuk menumbuhkan warga kritis yang tidak hanya paham teori, tetapi juga dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih egaliter (Nouri & Sajjadi, 2014).

Implementasi pendekatan emansipatoris menggeser peran guru menjadi fasilitator dialog yang mendukung peserta didik menyusun pengetahuan dan refleksi kritis secara kolaboratif. Lingkungan belajar menjadi interaktif, partisipatif, dan reflektif, bukan sekadar formalitas transfer informasi (Nouri & Sajjadi, 2014).

Pendekatan ini menuntut kurikulum yang fleksibel dan kontekstual, yang mengaitkan teori dengan praktik sosial peserta didik. Kurikulum tidak lagi bersifat kaku atau hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga relevan dengan pengalaman nyata dan kebutuhan sosial siswa (Wikipedia, Emancipatory pedagogy).

Evaluasi pendidikan pun berubah dari pengukuran semata-mata kemampuan hafalan menjadi penilaian atas refleksi kritis, partisipasi, dan tindakan nyata siswa dalam mengaplikasikan pembelajaran. Hal ini menekankan praxis sebagai pengukuran ketercapaian pembelajaran (Nouri & Sajjadi, 2014).

Akhirnya, pendekatan emansipatoris menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis, di mana perbedaan dihormati, partisipasi semua pihak diperkuat, dan nilai keadilan sosial menjadi dasar interaksi di kelas. Lingkungan semacam ini menumbuhkan budaya belajar yang kritis, kreatif, dan bertanggung jawab (Nugraheni & Firmansyah, 2020).

Pendekatan emansipatoris juga menekankan bahwa pengetahuan tidak pernah sepenuhnya netral, karena selalu dipengaruhi oleh kepentingan, nilai, dan relasi kekuasaan tertentu. Dalam pandangan teori kritis, pendidikan yang hanya mengulang pengetahuan secara teknis tanpa refleksi akan cenderung mereproduksi struktur sosial yang sudah ada, termasuk ketimpangan dan subordinasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendidikan emansipatoris mengarahkan peserta didik untuk memahami bahwa proses belajar adalah medan

sosial yang membentuk cara berpikir, cara bertindak, dan cara memandang realitas (Giroux, 2011; Freire, 1970).

Dalam pendidikan emansipatoris, relasi guru dan siswa tidak dibangun atas dasar dominasi, melainkan kemitraan pedagogis. Guru tidak diposisikan sebagai pemilik kebenaran tunggal, tetapi sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog, mendorong pencarian makna, dan membimbing siswa membangun kesimpulan melalui argumentasi rasional dan pengalaman konkret. Hubungan ini penting karena menciptakan suasana belajar yang egaliter dan memungkinkan siswa merasa dihargai sebagai manusia yang mampu berpikir dan mengambil keputusan (Freire, 1970; Habermas, 1984).

Aspek penting lain dari pendekatan emansipatoris adalah penguatan kapasitas refleksi diri (self-reflection) sebagai jalan menuju pembentukan kesadaran kritis. Refleksi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas berpikir ulang, tetapi sebagai proses mengenali akar persoalan, memahami sebab-akibat tindakan, dan mempertimbangkan konsekuensi moral serta sosial dari keputusan yang diambil. Melalui refleksi kritis, siswa dapat mengembangkan kontrol diri, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai, termasuk nilai kedisiplinan sebagai kebutuhan bersama dalam komunitas sekolah (Freire, 1970; Nouri & Sajjadi, 2014).

Pendekatan emansipatoris juga menempatkan partisipasi siswa sebagai bentuk pembelajaran demokrasi dalam praktik nyata. Ketika siswa dilibatkan dalam penyusunan aturan kelas, kesepakatan tata tertib, atau pengambilan keputusan sekolah, mereka belajar menghormati hak orang lain, memahami batas kebebasan, dan menyadari bahwa aturan dibentuk bukan untuk menekan, tetapi untuk menciptakan keteraturan bersama. Proses ini memperkuat internalisasi norma sosial yang lebih sehat dibandingkan kepatuhan yang dibangun melalui rasa takut (Dewey, 1916; Freire, 1970).

Dalam konteks sekolah, pendekatan emansipatoris juga dapat dipahami sebagai upaya membangun budaya sekolah yang adil dan inklusif. Budaya sekolah bukan hanya tradisi atau rutinitas, tetapi sistem nilai yang membentuk pola interaksi, pengambilan keputusan, dan cara sekolah menanggapi masalah. Pendidikan emansipatoris mendorong budaya sekolah yang menghargai suara

siswa, menolak kekerasan simbolik maupun fisik, serta menumbuhkan rasa aman psikologis sebagai prasyarat keterlibatan aktif dalam pembelajaran (Giroux, 2011; UNESCO, 2017).

Selain itu, pendidikan emansipatoris memandang disiplin sebagai proses pembentukan kesadaran moral, bukan sekadar kepatuhan mekanis. Disiplin tidak dimaknai sebagai “tunduk” kepada aturan, melainkan kemampuan individu mengelola diri secara sadar berdasarkan nilai yang dipahami. Dengan cara ini, disiplin menjadi bagian dari pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial, karena siswa belajar mengontrol tindakan atas dasar pilihan sadar, bukan karena ancaman hukuman (Freire, 1970; Ryan & Deci, 2000).

Pendekatan emansipatoris juga memiliki relevansi kuat dengan pendidikan karakter modern yang menekankan keterpaduan antara pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pendidikan karakter dalam perspektif ini bukan sekadar slogan atau seremonial, melainkan proses panjang yang melibatkan internalisasi nilai melalui pembiasaan, keteladanan, dialog moral, serta pembentukan lingkungan sosial yang mendukung. Disiplin menjadi salah satu indikator karakter yang berkembang ketika siswa diberi ruang untuk memaknai aturan sebagai kebutuhan hidup bersama (Lickona, 1991; Nouri & Sajjadi, 2014).

Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendekatan emansipatoris menuntut strategi yang memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah nyata (real-life problems). Pembelajaran berbasis proyek, diskusi reflektif, dan kerja kolaboratif menjadi media efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, serta kemampuan mengatur waktu dan peran dalam kelompok. Dengan demikian, disiplin tidak diajarkan melalui ceramah semata, tetapi dipraktikkan dalam aktivitas sosial yang memiliki tujuan dan konsekuensi jelas (Freire, 1970; UNESCO, 2017).

Pendekatan emansipatoris juga mengoreksi paradigma disiplin yang identik dengan hukuman, karena hukuman sering kali hanya menghasilkan kepatuhan sesaat tanpa mengubah kesadaran. Pendidikan emansipatoris lebih menekankan pemulihan (restorative) dibanding pembalasan, sehingga ketika terjadi pelanggaran, sekolah berupaya membantu siswa memahami dampak perilakunya, bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan sosial. Prinsip ini memperkuat

disiplin yang bertumbuh dari kesadaran moral dan sosial, bukan ketakutan (Morrison, 2007; UNESCO, 2017).

Pada akhirnya, pendekatan emansipatoris menjadi paradigma pendidikan yang sangat relevan dengan tuntutan penguatan profil pelajar Pancasila, karena menekankan nilai-nilai dialog, gotong royong, kebhinekaan, tanggung jawab, dan kemandirian. Pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang patuh secara administratif, tetapi membentuk individu yang memiliki kesadaran kritis, kemampuan refleksi, serta kemauan untuk bertindak secara etis dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendekatan emansipatoris berpotensi memperkuat sekolah sebagai ruang pembentukan warga demokratis dan berkarakter (Freire, 1970; Kemendikbudristek, 2020).

4. Kedisiplinan Siswa

Kedisiplinan siswa merupakan salah satu aspek fundamental dalam dunia pendidikan yang memiliki pengaruh langsung terhadap proses dan hasil pembelajaran. Disiplin tidak hanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan sekolah, tetapi juga sebagai bentuk pengendalian diri, tanggung jawab pribadi, dan ketekunan dalam menjalankan tugas belajar. Menurut Dewi (2020), “Disiplin tidak hanya mencakup ketaatan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan sikap tanggung jawab, ketekunan, dan kemampuan mengelola diri”.

Disiplin yang baik membantu siswa membentuk kebiasaan belajar positif, memanfaatkan waktu secara efisien, dan tetap fokus terhadap tujuan pendidikan mereka. Pendapat ini diperkuat oleh Cahyani & Winata (2020) yang menyatakan bahwa “Disiplin menjadi dasar penting dalam membentuk karakter siswa serta mempengaruhi pencapaian prestasi akademik”.

Dalam praktiknya, penerapan kedisiplinan di sekolah tidak selalu berjalan efektif. Anggriyani (2024) mengungkapkan bahwa masih banyak siswa yang menunjukkan perilaku tidak disiplin seperti terlambat datang ke sekolah, melanggar aturan berpakaian, dan tidak mengerjakan tugas rumah. Masalah ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi formal dengan kesadaran siswa dalam menerapkan disiplin secara internal. Oleh karena itu, diperlukan

strategi pembinaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan pendekatan psikologis dan relasional.

Lebih lanjut, Nasution (2019) menyatakan bahwa "keberhasilan disiplin di sekolah sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah, peran guru, dan keterlibatan orang tua. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pihak sekolah dan keluarga dalam membentuk perilaku disiplin yang konsisten".

Dalam konteks pendekatan yang lebih membangun, Saputra dan Handayani (2022) menyarankan penerapan strategi pendekatan dialogis dan pemberian tanggung jawab kepada siswa, agar mereka tidak sekadar mematuhi aturan karena takut hukuman, tetapi karena memahami nilai-nilai penting di balik peraturan tersebut. Hal ini selaras dengan pendekatan emansipatoris yang menekankan pembinaan kedisiplinan melalui kesadaran diri dan pembentukan karakter secara reflektif.

Sementara itu, Wulandari & Ismail (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa "penerapan program pembinaan disiplin berbasis nilai dan empati lebih efektif dibanding pendekatan otoriter. Mereka menyoroti pentingnya pelibatan siswa dalam penyusunan tata tertib sekolah dan pelaksanaan evaluasi kedisiplinan sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan tanggung jawab".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa tidak hanya merupakan kepatuhan terhadap aturan sekolah, melainkan juga mencerminkan sikap internal yang berkembang melalui proses pendidikan yang dialogis, konsisten, dan berpusat pada siswa. Pendekatan yang berbasis nilai, partisipatif, dan reflektif menjadi strategi penting untuk menanamkan disiplin yang berkelanjutan.

Kedisiplinan dalam dunia pendidikan bukan hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, melainkan juga membentuk kepribadian siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan berkarakter. Penanaman disiplin merupakan bagian penting dari pendidikan karakter karena membantu siswa memahami batasan perilaku, tanggung jawab pribadi, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sekolah dan sosial. Melalui pembinaan disiplin yang tepat, sekolah

dapat membentuk budaya belajar yang tertib, produktif, dan mendukung perkembangan moral siswa.

1. Tujuan utama dari penanaman kedisiplinan siswa meliputi beberapa aspek berikut.

a) Menumbuhkan Tanggung Jawab Pribadi, Kedisiplinan menjadi sarana utama untuk menanamkan rasa tanggung jawab siswa terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekolah. Dalam proses pendidikan, siswa yang disiplin tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga menunjukkan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban secara konsisten tanpa harus terus-menerus dikontrol oleh pihak luar. Hal ini menjadi indikator bahwa siswa telah mampu menjalankan peran sebagai individu yang bertanggung jawab.

Menurut Mulyasa (2013), “tujuan utama kedisiplinan adalah menanamkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan tugas-tugas yang menjadi kewajiban siswa di sekolah. Disiplin merupakan bentuk internalisasi tanggung jawab siswa dalam melaksanakan kewajibannya secara sadar dan konsisten.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa disiplin tidak hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang proses pembentukan kesadaran diri sebagai pelajar dan anggota komunitas sekolah.

Dengan demikian, tanggung jawab pribadi yang dibangun melalui disiplin dapat mencakup keteraturan dalam belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, menghormati aturan sekolah, dan menjaga perilaku di lingkungan sekolah. Ketika tanggung jawab sudah tertanam, siswa akan lebih mudah membangun sikap mandiri, tidak mudah terpengaruh oleh perilaku negatif, serta mampu menilai tindakan mereka berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.

b) Membentuk Karakter dan Sikap Positif, Disiplin merupakan salah satu jalan efektif untuk membentuk karakter siswa karena melatih konsistensi dan integritas dalam bertindak. Ketika siswa terbiasa disiplin, mereka akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan menuntut tanggung jawab moral. Pendidikan disiplin pada akhirnya menjadi penguatan nilai-nilai karakter yang melekat dalam perilaku sehari-hari.

Rahmatiani (2020) menyatakan bahwa “disiplin membentuk karakter bangsa yang kuat, jujur, dan konsisten, serta mendorong siswa untuk bertindak

berdasarkan nilai dan norma yang berlaku. Pendidikan disiplin menjadi kunci dalam membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa.” Dalam konteks ini, disiplin bukan sekadar keteraturan, tetapi merupakan pondasi bagi pembentukan karakter yang kuat dan berorientasi pada nilai moral.

Oleh karena itu, disiplin yang ditanamkan dengan pendekatan edukatif dapat membentuk sikap positif seperti kejujuran, ketekunan, rasa hormat, dan kepedulian terhadap aturan bersama. Siswa yang berkarakter tidak akan berperilaku baik hanya karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa sikap disiplin mencerminkan kualitas diri dan tanggung jawab sebagai pelajar.

c) Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, Kedisiplinan berperan besar dalam menunjang kualitas pembelajaran karena membantu menciptakan keteraturan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran yang efektif menuntut suasana kelas yang kondusif, keteraturan waktu, serta kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Tanpa disiplin, pembelajaran mudah terganggu oleh keterlambatan, ketidakteraturan, dan perilaku yang tidak mendukung fokus belajar.

Cahyani & Winata (2020) menegaskan bahwa “kedisiplinan siswa berdampak langsung pada efektivitas proses belajar. Siswa yang disiplin memiliki kebiasaan belajar yang baik dan pencapaian akademik yang lebih tinggi. Disiplin bukan hanya mendukung keteraturan, tetapi menjadi fondasi keberhasilan akademik.” Pernyataan ini memperlihatkan keterkaitan erat antara disiplin dan capaian akademik siswa.

Dengan demikian, disiplin tidak hanya penting untuk menciptakan ketertiban, melainkan juga berfungsi meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Siswa yang disiplin cenderung memiliki manajemen waktu yang baik, mempersiapkan diri sebelum belajar, serta memiliki kesungguhan dalam menyerap materi. Keadaan ini akan mempengaruhi peningkatan prestasi dan memperkuat budaya belajar positif di sekolah.

d) Mengembangkan Kemampuan Manajemen Diri, Disiplin adalah salah satu bentuk latihan keterampilan hidup (life skill) karena membiasakan siswa mengelola dirinya dalam berbagai situasi. Manajemen diri mencakup kemampuan mengatur waktu, mengendalikan emosi, menjaga komitmen belajar, serta

menahan diri dari perilaku impulsif. Kedisiplinan membuat siswa mampu memprioritaskan tugas yang penting dan bertanggung jawab atas setiap pilihan mereka.

Dewi (2020) menyatakan bahwa “siswa yang disiplin mampu mengatur waktu, mengendalikan emosi, dan menjaga konsistensi dalam berperilaku. Disiplin mencerminkan kemampuan siswa dalam mengelola diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan belajar.” Disiplin pada akhirnya menjadi indikator bahwa siswa sudah mampu menata perilaku secara sadar sesuai tuntutan lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, ketika siswa memiliki kemampuan manajemen diri yang baik, mereka cenderung lebih stabil dalam bersikap, lebih teratur dalam belajar, serta lebih siap menghadapi berbagai tekanan akademik maupun sosial. Kemampuan ini penting karena menjadi bekal untuk menghadapi tantangan pendidikan lanjutan dan kehidupan bermasyarakat, di mana kontrol diri menjadi kunci keberhasilan.

e) Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Kondusif, Lingkungan sekolah yang kondusif merupakan syarat penting untuk berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Kedisiplinan membantu menciptakan suasana yang tertib dan aman, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan tanpa gangguan. Sekolah yang disiplin akan lebih mudah membangun budaya akademik yang produktif dan menyenangkan bagi siswa maupun guru.

Astuti & Purwani (2023) menyatakan bahwa “kedisiplinan menciptakan suasana sekolah yang tertib, aman, dan produktif, yang memungkinkan proses pendidikan berjalan lancar. Kedisiplinan adalah landasan utama dalam menciptakan budaya sekolah yang positif.” Ini berarti bahwa disiplin tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menentukan kualitas sistem dan budaya sekolah secara menyeluruh.

Dengan adanya lingkungan yang kondusif, siswa akan merasa nyaman, terlindungi, dan termotivasi untuk belajar. Guru juga dapat menjalankan pembelajaran secara optimal karena kelas lebih terorganisir dan terarah. Pada akhirnya, kedisiplinan menjadi fondasi terbentuknya budaya sekolah yang mendukung penguatan karakter dan pencapaian prestasi secara seimbang.

f) Mendorong Kesadaran Sosial, Kedisiplinan tidak hanya berkaitan dengan aturan pribadi, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sosial siswa dalam menghargai orang lain. Disiplin mengajarkan bahwa tindakan seseorang berdampak pada orang lain, baik dalam suasana kelas, kegiatan sekolah, maupun kehidupan sosial sehari-hari. Dengan disiplin, siswa memahami bahwa aturan sosial diperlukan untuk menjaga keteraturan dan harmoni.

Menurut Kenedi (2017), “disiplin membentuk kepedulian siswa terhadap orang lain dan mendorong untuk bertindak sesuai norma sosial yang berlaku. Sikap disiplin mengajarkan siswa untuk menghargai hak orang lain dan memahami pentingnya aturan sosial.” Hal ini menunjukkan bahwa disiplin merupakan sarana untuk membangun kepekaan sosial yang kuat pada diri siswa.

Dengan demikian, kesadaran sosial yang tumbuh melalui disiplin dapat terlihat dalam sikap saling menghormati, kemampuan bekerja sama, tidak mengganggu proses belajar, serta patuh pada aturan demi kepentingan bersama. Siswa akan belajar bahwa disiplin bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap komunitas dan lingkungan sosial di sekolah.

g) Membantu Siswa Menghindari Perilaku Negatif, Salah satu manfaat kedisiplinan dalam pendidikan adalah mencegah munculnya perilaku negatif dan menyimpang yang dapat merugikan siswa maupun lingkungan sekolah. Perilaku seperti membolos, terlambat, melanggar aturan seragam, atau mengganggu pembelajaran seringkali terjadi ketika siswa tidak memiliki kontrol diri dan kesadaran terhadap konsekuensi. Kedisiplinan membantu membangun batas perilaku yang jelas.

Anggriyani (2024) menyatakan bahwa “kedisiplinan mencegah perilaku menyimpang seperti membolos, terlambat, dan melakukan pelanggaran tata tertib. Disiplin yang dibangun sejak dini membantu siswa mengenali batas perilaku yang dapat diterima.” Disiplin bukan berarti menekan siswa, tetapi memberi arah dan pedoman agar siswa tidak terjebak pada kebiasaan buruk yang merugikan masa depan mereka.

Oleh karena itu, kedisiplinan berfungsi sebagai mekanisme pencegahan sekaligus pembinaan karakter yang membantu siswa membangun perilaku positif

secara berkelanjutan. Dengan disiplin yang konsisten, siswa belajar mengelola kebiasaan, menahan diri dari tindakan negatif, serta menjaga integritas diri sebagai pelajar yang bertanggung jawab dan beretika.

Kedisiplinan siswa merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor - faktor ini sangat menentukan bagaimana sikap dan perilaku disiplin dibentuk dan dipertahankan dalam kehidupan sekolah.

a) Faktor Internal (Dari Dalam Diri Siswa)

1) Motivasi dan Kesadaran Diri

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan kesadaran diri yang baik cenderung menunjukkan perilaku disiplin yang konsisten. Motivasi intrinsik dan kesadaran pribadi berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk perilaku disiplin, karena siswa terdorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pengawasan eksternal (Wiyani, 2013).

Motivasi intrinsik menjadi penggerak internal yang membuat siswa mampu mengatur dirinya untuk tetap menaati aturan sekolah, seperti hadir tepat waktu, menyelesaikan tugas, serta menjaga perilaku dalam proses pembelajaran. Ketika siswa memahami tujuan belajar sebagai kebutuhan dirinya sendiri, maka disiplin tidak lagi dipahami sebagai tuntutan sekolah, tetapi sebagai bagian dari komitmen pribadi untuk berkembang. Dengan demikian, kedisiplinan yang tumbuh dari motivasi internal cenderung lebih kuat dan bertahan lama dibandingkan disiplin yang dibentuk hanya karena takut sanksi.

Kesadaran diri juga menjadi faktor penting karena memungkinkan siswa mampu merefleksikan perilakunya, membedakan tindakan yang tepat dan tidak tepat, serta menyadari konsekuensi dari pelanggaran aturan. Siswa yang memiliki kesadaran diri biasanya lebih mampu mengontrol emosi, mengelola waktu, serta menahan dorongan untuk melakukan tindakan impulsif yang melanggar tata tertib. Oleh karena itu, motivasi dan kesadaran diri merupakan dasar pembentukan disiplin yang bersifat personal, reflektif, dan berkelanjutan.

2) Karakter dan Kepribadian

Karakter dan kepribadian siswa, seperti rasa tanggung jawab, ketekunan, dan kemampuan mengontrol diri, sangat memengaruhi tingkat kedisiplinan

mereka. Kedisiplinan dapat dipahami sebagai cerminan kemampuan individu dalam mengelola diri sendiri dan mengendalikan perilaku sesuai aturan yang berlaku di sekolah maupun lingkungan sosialnya (Dewi, 2020).

Siswa yang memiliki karakter tanggung jawab umumnya lebih mudah diarahkan dalam mematuhi aturan sekolah, karena mereka memahami bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi. Tanggung jawab membuat siswa mampu menjalankan kewajibannya secara sadar, misalnya menjaga ketertiban kelas, mematuhi tata tertib, dan menyelesaikan tugas tanpa harus selalu diingatkan. Dalam konteks ini, kedisiplinan menjadi bagian dari integritas diri dan sikap moral siswa, bukan sekadar rutinitas formal.

Selain itu, ketekunan dan kontrol diri juga menjadi aspek penting dalam pembentukan disiplin. Ketekunan membuat siswa mampu bertahan menghadapi aturan dan tuntutan belajar yang konsisten, sedangkan kontrol diri membantu siswa menahan perilaku negatif seperti membolos, datang terlambat, atau mengganggu proses pembelajaran. Dengan demikian, karakter dan kepribadian siswa berfungsi sebagai modal psikologis yang membentuk kedisiplinan sebagai kebiasaan positif yang tertanam dalam diri siswa.

b) Faktor Eksternal (Lingkungan Sekitar)

1) Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan fondasi utama dalam pembentukan kedisiplinan siswa karena keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama yang dialami anak. Pola asuh orang tua, kebiasaan sehari-hari, serta nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini sangat menentukan cara anak memandang aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang konsisten menerapkan aturan, memberikan contoh kedisiplinan, dan membangun komunikasi yang hangat cenderung memiliki pemahaman disiplin yang lebih baik dan berkelanjutan.

Selain konsistensi aturan, kualitas interaksi antara orang tua dan anak juga berperan penting dalam membentuk disiplin. Pola asuh yang demokratis, yang menggabungkan kontrol dan kehangatan, mendorong anak untuk mematuhi aturan bukan karena takut hukuman, tetapi karena memahami maknanya. Dalam konteks ini, Cahyani & Winata (2020) menegaskan bahwa “keluarga yang menerapkan

nilai-nilai disiplin sejak dini cenderung menghasilkan anak yang lebih bertanggung jawab”, karena anak belajar menginternalisasi nilai disiplin sebagai bagian dari identitas dirinya.

Sebaliknya, lingkungan keluarga yang kurang memberikan perhatian, inkonsisten dalam aturan, atau terlalu permisif dapat melemahkan pembentukan kedisiplinan anak. Ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan di rumah dan di sekolah sering kali menyebabkan kebingungan perilaku pada siswa. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung program kedisiplinan sekolah menjadi faktor penting agar pembinaan disiplin berjalan selaras dan berkesinambungan.

2) Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan lingkungan formal yang memiliki peran strategis dalam memperkuat atau melemahkan kedisiplinan siswa. Aturan sekolah, budaya organisasi, serta konsistensi penegakan tata tertib menjadi kerangka utama yang membentuk perilaku siswa dalam keseharian. Lingkungan sekolah yang tertib, aman, dan kondusif akan mendorong siswa untuk menyesuaikan diri dengan norma disiplin yang berlaku secara sadar.

Peran guru sebagai figur teladan sangat menentukan keberhasilan pembinaan disiplin di sekolah. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model perilaku bagi siswa. Keteladanan guru dalam hal ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan sikap tanggung jawab akan lebih efektif dibandingkan sekadar pemberian instruksi atau sanksi. Astuti & Purwani (2023) menyatakan bahwa “sekolah yang memiliki sistem manajemen kesiswaan yang baik akan membentuk budaya disiplin yang kuat”, karena nilai disiplin diinternalisasikan melalui keteladanan dan pembiasaan.

Selain itu, budaya sekolah yang partisipatif dan inklusif juga berpengaruh besar terhadap disiplin siswa. Ketika siswa dilibatkan dalam penyusunan aturan, kegiatan sekolah, dan pengambilan keputusan tertentu, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mematuhi aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, disiplin tidak lagi dipandang sebagai tekanan eksternal, melainkan sebagai bagian dari kesepakatan sosial yang harus dijaga bersama.

3) Lingkungan Sosial dan Teman Sebaya

Lingkungan sosial, khususnya pengaruh teman sebaya, memiliki dampak signifikan terhadap perilaku disiplin siswa, terutama pada usia remaja. Pada fase ini, siswa cenderung lebih sensitif terhadap penerimaan sosial dan sering menyesuaikan perilakunya dengan kelompok sebaya. Jika lingkungan pergaulan mendukung perilaku positif, maka kedisiplinan siswa akan semakin kuat.

Interaksi sosial yang sehat dapat memperkuat norma disiplin melalui mekanisme saling mengingatkan, memberi contoh, dan membangun budaya positif di antara siswa. Kenedi (2017) menyatakan bahwa “interaksi sosial yang positif di antara siswa akan memperkuat norma disiplin yang berlaku”, karena nilai disiplin diperkuat melalui pengaruh sosial yang konstruktif. Teman sebaya dapat menjadi agen kontrol sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan sekolah.

Namun, apabila lingkungan sosial siswa didominasi oleh perilaku negatif, seperti pelanggaran aturan atau sikap acuh terhadap tata tertib, maka kedisiplinan siswa berpotensi melemah. Oleh karena itu, sekolah perlu mengelola dinamika kelompok siswa melalui pembinaan karakter, penguatan peran OSIS, dan kegiatan ekstrakurikuler yang positif agar pengaruh teman sebaya dapat diarahkan secara konstruktif.

c) Faktor Struktural dan Sistemik

1) Sistem Manajemen Kesiswaan

Sistem manajemen kesiswaan merupakan faktor struktural yang sangat menentukan keberhasilan pembinaan kedisiplinan siswa. Manajemen kesiswaan yang terencana, terorganisasi, dan berkelanjutan akan menciptakan mekanisme pembinaan disiplin yang sistematis, bukan reaktif. Sistem ini mencakup perencanaan program, pengorganisasian peran, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, serta tindak lanjut terhadap perilaku siswa.

Arinalhaq dkk. (2025) menegaskan bahwa “manajemen kesiswaan yang terstruktur berkontribusi besar dalam membentuk karakter disiplin siswa”, karena sistem yang baik memungkinkan pembinaan disiplin dilakukan secara konsisten dan berkeadilan. Manajemen kesiswaan yang efektif tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan dan pengembangan kesadaran disiplin siswa.

Dalam konteks pendekatan emansipatoris, sistem manajemen kesiswaan seharusnya memberi ruang partisipasi siswa sebagai subjek pembinaan. Ketika siswa dilibatkan dalam evaluasi dan tindak lanjut kedisiplinan, mereka belajar bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Dengan demikian, manajemen kesiswaan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter.

2) Kebijakan Sekolah dan Peraturan

Kebijakan sekolah dan peraturan merupakan instrumen formal yang mengatur perilaku warga sekolah. Aturan yang jelas, adil, dan mudah dipahami akan menciptakan kepastian dan rasa keadilan bagi siswa. Ketika aturan disosialisasikan dengan baik dan diterapkan secara konsisten, siswa akan lebih mudah menerima dan mematuhi.

Sudrajat (2011) menyatakan bahwa “keberhasilan penegakan disiplin tergantung pada sejauh mana aturan diterapkan secara konsisten dan berkeadilan”. Hal ini menunjukkan bahwa masalah disiplin bukan terletak pada banyaknya aturan, melainkan pada kualitas penerapannya. Ketidakadilan atau inkonsistensi dalam penerapan aturan justru dapat menurunkan kepercayaan siswa terhadap sistem sekolah.

Oleh karena itu, kebijakan sekolah perlu disusun secara partisipatif dan dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa. Dalam pendekatan emansipatoris, aturan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pendidikan nilai, sehingga siswa memahami makna disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan pribadi.

Aturan yang tegas, adil, serta dipahami oleh seluruh warga sekolah menciptakan suasana yang kondusif untuk pembentukan kedisiplinan. Menurut Sudrajat (2011), “Keberhasilan penegakan disiplin tergantung pada sejauh mana aturan diterapkan secara konsisten dan berkeadilan. “

Kedisiplinan siswa dibentuk oleh gabungan faktor internal seperti motivasi dan kepribadian, serta faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Di samping itu, sistem manajemen kesiswaan dan kebijakan sekolah juga sangat menentukan. Oleh karena itu, upaya membangun disiplin harus melibatkan

pendekatan menyeluruh yang mencakup pembinaan pribadi dan dukungan lingkungan yang positif.

Secara keseluruhan, kedisiplinan siswa merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Motivasi, kesadaran diri, dan kepribadian siswa akan berkembang secara optimal apabila didukung oleh lingkungan keluarga yang kondusif, sekolah yang berbudaya disiplin, serta pergaulan sosial yang positif. Di samping itu, sistem manajemen kesiswaan dan kebijakan sekolah berperan sebagai kerangka struktural yang memperkuat pembinaan disiplin.

Oleh karena itu, upaya membangun kedisiplinan siswa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan pembinaan individu dan dukungan lingkungan. Pendekatan emansipatoris menjadi relevan karena menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan disiplin, bukan sekadar objek aturan dan sanksi.

Permasalahan Kedisiplinan Siswa di Sekolah

Kedisiplinan siswa merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Namun, realitas di berbagai sekolah, termasuk di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMP), menunjukkan bahwa permasalahan kedisiplinan masih menjadi isu yang serius dan kompleks.

Menurut Dewi, Cahyani, & Winata (2020), “banyak sekolah menghadapi persoalan seperti keterlambatan siswa masuk kelas, pelanggaran tata tertib berpakaian, tidak mengerjakan tugas, serta bolos tanpa izin. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ditetapkan, penerapannya belum sepenuhnya efektif untuk membentuk kebiasaan disiplin yang berkelanjutan”.

Anggriyani (2024) mencatat bahwa pelanggaran disiplin di sekolah sering kali disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya teladan dari guru, serta pendekatan pembinaan yang masih cenderung bersifat hukuman, bukan pembinaan karakter.

Selain itu, Arinalhaq, dkk (2025) menekankan bahwa “manajemen kesiswaan yang kurang responsif terhadap kebutuhan psikologis siswa dan belum menerapkan pendekatan yang emansipatoris menjadi salah satu akar permasalahan. Ketika kedisiplinan ditegakkan tanpa memperhatikan aspek

emosional dan komunikasi dua arah, siswa justru menjadi resisten terhadap aturan“.

Permasalahan lainnya juga berkaitan dengan minimnya keterlibatan orang tua, seperti yang dikemukakan oleh Astuti & Purwani (2023). Kedisiplinan siswa tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama antara pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa permasalahan kedisiplinan siswa di sekolah bukan hanya akibat dari kurangnya aturan, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya pendekatan pembinaan, kurangnya sinergi antara guru, siswa, dan orang tua, serta absennya strategi manajemen kesiswaan yang mengedepankan pendekatan emansipatoris. Oleh karena itu, solusi terhadap masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang menekankan pada kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif seluruh elemen sekolah.

Strategi Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Berbasis Pendekatan Emansipatoris

Kedisiplinan merupakan kunci dalam pembentukan karakter siswa serta terciptanya lingkungan belajar yang tertib, kondusif, dan partisipatif. Dalam konteks pendidikan, strategi untuk meningkatkan kedisiplinan harus dirancang berdasarkan prinsip emansipatoris, yakni memberdayakan siswa sebagai subjek aktif dalam memahami dan menerapkan aturan, bukan sekadar memaksakan kepatuhan melalui hukuman.

Menurut Sugiyono (2017), “strategi peningkatan kedisiplinan perlu dimulai dengan pendekatan preventif melalui pembiasaan, pemberian contoh oleh guru, dan penguatan budaya sekolah yang positif. Guru berperan sebagai fasilitator dan teladan, membimbing siswa memahami makna kedisiplinan secara sadar.” Dalam perspektif emansipatoris, guru tidak hanya menegakkan aturan, tetapi mengajak siswa berdialog tentang nilai dan tujuan kedisiplinan sehingga mereka memahaminya secara internal.

Firdaus & Mariyat (2017) menyatakan bahwa “pendekatan emansipatoris dapat digunakan sebagai strategi efektif dalam pembinaan disiplin.” Pendekatan emansipatoris memperluas prinsip ini dengan menekankan partisipasi siswa dalam merumuskan aturan, refleksi kritis terhadap konsekuensi pelanggaran, dan dialog

tentang makna disiplin, sehingga kepatuhan lahir dari kesadaran, bukan rasa takut terhadap hukuman.

Haera, Muhaemin, & Bungawati (2024) menambahkan bahwa “pembentukan karakter disiplin dapat dilakukan melalui pembelajaran reflektif, pemberian tanggung jawab, dan pembinaan berbasis nilai-nilai agama dan sosial.” Dengan pendekatan emansipatoris, pemberian tanggung jawab ini dikaitkan dengan peluang siswa untuk mengambil keputusan dan menilai tindakan mereka sendiri, sementara reward dan reinforcement positif tetap digunakan sebagai penguatan internal motivasi, bukan sekadar pengendalian eksternal.

Alfiyanti (2024) menekankan pentingnya lingkungan kelas yang inklusif dan mendukung sebagai strategi mendasar untuk meningkatkan disiplin. Perspektif emansipatoris menegaskan bahwa ketika siswa merasa dihargai, aman, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka lebih mudah memahami dan menaati aturan secara sadar serta menginternalisasi nilai-nilai disiplin.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan kolaborasi antarunit di sekolah (BK, wali kelas, kesiswaan) menjadi faktor penting. Arinalhaq dkk. (2025) menjelaskan bahwa “sinergi antara sekolah dan keluarga mampu memperkuat sistem pembinaan kedisiplinan secara menyeluruh.” Dalam pendekatan emansipatoris, sinergi ini diperluas dengan melibatkan siswa dalam diskusi keluarga-sekolah mengenai tanggung jawab, aturan, dan konsekuensi, sehingga kedisiplinan menjadi hasil refleksi kolektif.

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi peningkatan kedisiplinan siswa berbasis pendekatan emansipatoris menekankan pemberdayaan siswa sebagai subjek pendidikan, pembinaan karakter secara sadar dan reflektif, lingkungan belajar yang inklusif dan suportif, peran guru sebagai fasilitator dan teladan, keterlibatan orang tua, serta sistem evaluasi dan tindak lanjut yang partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membentuk siswa yang bertanggung jawab, kritis, dan mampu menginternalisasi nilai-nilai disiplin secara mandiri (Freire, 2005; Nouri & Sajjadi, 2014).

B. Landasan Enam Sistem Nilai

Dalam konteks pendidikan yang mengedepankan pendekatan emansipatoris, pembinaan kedisiplinan tidak hanya dipandang sebagai upaya menanamkan kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga sebagai proses internalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam. Oleh karena itu, pendekatan ini menuntut integrasi dari enam sistem nilai yang saling berkaitan dalam menciptakan budaya disiplin yang manusiawi, reflektif, dan bertanggung jawab. Menurut Sanusi (1992), sistem pendidikan nasional semestinya bertumpu pada enam sistem nilai dasar yang menjadi landasan moral dan kultural dalam pembangunan bangsa. Keenam sistem nilai tersebut meliputi :

1. Nilai religius (nilai ketuhanan) - Pendidikan harus berakar pada nilai - nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks manajemen kesiswaan, nilai ini menjadi landasan dalam pembentukan karakter spiritual siswa dan dalam membangun pendekatan pembinaan yang beradab dan menghargai martabat manusia.
2. Nilai etis - Berkaitan dengan norma dan akhlak, nilai ini menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Dalam pendekatan emansipatoris terhadap manajemen kesiswaan, nilai ini tampak dalam upaya membina disiplin melalui keteladanan dan komunikasi yang etis.
3. Nilai estetis Mengacu pada pengembangan keindahan, kreativitas, dan harmoni dalam kehidupan. Sekolah yang menerapkan pendekatan emansipatoris dalam manajemen kesiswaan juga memperhatikan kenyamanan lingkungan dan cara yang menyenangkan dalam membina kedisiplinan siswa.
4. Nilai intelektual Menghargai akal dan nalar dalam mengambil keputusan. Manajemen kesiswaan yang efektif berbasis pendekatan emansipatoris akan mengedepankan rasionalitas, dialog, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan siswa.
5. Nilai individualitas Menghargai potensi dan keunikan setiap individu. Dalam konteks ini, manajemen kesiswaan perlu memberi ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya serta memperlakukan siswa secara personal, bukan sebagai objek disiplin yang seragam.

6. Nilai sosial Mengacu pada penghormatan terhadap kehidupan bersama, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan emansipatoris, siswa diarahkan untuk memahami pentingnya tata tertib demi kebaikan bersama, bukan sekadar sebagai kewajiban personal.

C. Landasan Kebijakan

Penelitian ini didasari oleh sejumlah kebijakan nasional yang mendukung penerapan manajemen kesiswaan yang emansipatoris dalam rangka pembinaan kedisiplinan siswa secara efektif dan berkarakter.

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang - Undang ini menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, termasuk kedisiplinan dan tanggung jawab sosial siswa. Hal ini menjadi dasar penting bagi manajemen kesiswaan untuk menerapkan pendekatan yang memanusiakan dan mendukung tumbuh kembang siswa secara optimal.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Pendekatan emansipatoris dalam manajemen kesiswaan sejalan dengan amanat ini, karena mengutamakan keterlibatan emosional dan pendekatan yang tidak represif dalam membina kedisiplinan siswa.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
Permendikbud ini menggarisbawahi pentingnya pembiasaan nilai - nilai positif melalui keteladanan, pembiasaan, dan penguatan budaya sekolah. Oleh karena itu, pendekatan emansipatoris menjadi strategi yang selaras untuk menanamkan kedisiplinan secara reflektif dan sadar.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Permendikbud ini menekankan perlunya sekolah menerapkan pendekatan pembinaan yang non - kekerasan dan membangun sistem pengelolaan perilaku siswa yang ramah anak. Manajemen kesiswaan berbasis emansipatoris berusaha menghindari praktik - praktik represif dan mengedepankan dialog, konseling, dan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan psikologis siswa.

Landasan kebijakan di atas menunjukkan bahwa penerapan manajemen kesiswaan berbasis dalam meningkatkan pendekatan emansipatoris dalam meningkatkan kedisiplinan siswa merupakan bentuk implementasi dari berbagai kebijakan nasional yang mengedepankan pendidikan karakter, perlindungan anak, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki justifikasi yang kuat untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola kesiswaan yang lebih humanis dan efektif dalam konteks SMP.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang manajemen kesiswaan melalui pendekatan emansipatoris dalam meningkatkan kedisiplinan siswa perlu membuat kajian ilmiah pada pembahasan, maka diperlukan rujukan dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2 2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kesamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fajri, M., Pohan, L.S., dkk.	<i>School discipline management as an effort to improve positive behavior of students at SMP Negeri 50 Pekanbaru</i>	Manajemen kedisiplinan sekolah efektif meningkatkan perilaku positif siswa: menghormati, tanggung jawab, ketepatan waktu, kerja sama.	Sama pada fokus manajemen disiplin siswa SMP	Tidak menggunakan pendekatan emansipatoris ; fokus pada perilaku positif umum.
2	Asnani, Astuti,	<i>Manajemen Kesiswaan</i>	Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi	Sama fokus pada	Tidak memakai

	Fajri, Jamaluddin	<i>dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMP Negeri 4 Awangpone</i>	manajemen kesiswaan berpengaruh pada kedisiplinan siswa; ada pembinaan orientasi, apel, ekstrakurikuler.	manajemen kesiswaan dan kedisiplinan siswa SMP	perspektif emansipatoris ; tidak eksplisit memberdayakan siswa.
3	Teti Ratnawulan & Nurul Juliana	<i>Peran Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTs Yasipa</i>	Manajemen kesiswaan terstruktur (POAC) terbukti efektif meningkatkan kedisiplinan siswa dengan peran sekolah-orang tua.	Sama pada manajemen kesiswaan & hasil pada kedisiplinan siswa	Fokus pada MTs (madrasah) bukan SMP umum; pendekatan deskriptif standar.
4	Ulpah Nupusiah, Rama Aditya, Devi Silvia	<i>Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa (Studi Kasus di SMK Ma'arif Cijulang)</i>	Kontribusi manajemen kesiswaan dalam kedisiplinan terlihat melalui aturan, sosialisasi, kontrol pakaian dan kehadiran serta ekstrakurikuler.	Sama pada manajemen kesiswaan & implementasi kedisiplinan	Subjek pada SMK bukan SMP; tidak emansipatoris .
5	Muhammad Afan, Diani Syahfitri, dkk.	<i>Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTS Al Jamilah</i>	Menemukan aturan disiplin yang terbentuk sesuai tujuan sekolah; disiplin waktu, berpakaian, partisipasi mengikuti aturan.	Sama pada fokus implementasi manajemen kesiswaan	Konteks Madrasah Tsanawiyah, bukan eksplorasi pendekatan baru (seperti emansipatoris).
6	Khairunnisa & Slamet Untung	<i>Sistem manajemen kesiswaan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTs Ma'arif NU Buaran</i>	Program piket, kegiatan keagamaan, ekstra, evaluasi terintegrasi efektif membangun tanggung jawab & disiplin siswa.	Sama pada manajemen kesiswaan & hasil pada kedisiplinan	Fokus pada program terintegrasi umum, bukan pendekatan keterlibatan siswa.
7	Baiq Yayuk Samsiniwati	<i>Student management in building a culture of discipline junior high school students</i>	Perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan faktor pendukung/inhibitor dalam budaya disiplin siswa di SMP.	Sama pada budaya & manajemen disiplin siswa SMP	Tidak berdasar pendekatan pemberdayaan/partisipatif siswa.

		<i>in Lombok</i>			
8	Sifa Aliya Naflah & Muhamma d Fadhli	<i>Pengaruh Manajemen Kesiswaan terhadap Disiplin Belajar Siswa di Yayasan Zia Salsabila</i>	Manajemen kesiswaan berkontribusi signifikan terhadap disiplin belajar siswa (kuantitatif).	Sama pada pengaruh manajemen terhadap kedisiplinan	Metode kuantitatif, bukan studi kasus; tidak emansipatoris .